

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Negeri Tirai Bambu menjadi raksasa ekonomi di tengah kelesuan global belakangan ini. Investasi Tiongkok yang terus meningkat tidak hanya terjadi di dunia, tapi juga Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat China sebagai negara ketiga yang paling banyak berinvestasi di Indonesia pada tahun 2017 dengan 3,36 miliar dolar AS. (BKPM, 2021)

Investasi negara itu terus merangkak naik. Pada tahun 2013, misalnya, jumlahnya sebesar 297 juta dolar AS dan bertengger di posisi 12, kemudian pada tahun 2015 naik menjadi peringkat ke-9 dengan investasi 628 juta dolar AS hingga mencapai posisi ketiga pada tahun 2017. Sebagai menjadi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Pasifik, Dinilai wajar saja jika kemudian mitra dagang utama bagi 121 negara di dunia itu menjadi negara yang diincar banyak pihak sebagai investor potensial. China menjadi salah satu investor terbesar di hampir semua negara di Asia Pasifik, bahkan dunia. (BKPM, 2021)

China sendiri mengaku akan terus meningkatkan investasi ke Indonesia setelah sepanjang 2017 pertumbuhan investasi negeri tirai bambu di Indonesia mencapai 27 persen. Pada tahun lalu investasi China di Indonesia tumbuh 27 persen. Ini momentum yang akan terus berlanjut, bahkan sampai ke tahun-tahun berikutnya (Liping, 2021). Bahwa keyakinan tumbuhnya investasi China ke Indonesia berdasarkan upaya kedua negara untuk terus meningkatkan kerja sama ekonomi. Pemerintah Indonesia, di sisi lain, juga terus melakukan upaya perbaikan untuk dapat mengundang investor China masuk dan menanamkan

modal di Tanah Air. Ditambah pula dengan besarnya pasar Indonesia dan sumber daya alam melimpah. China sendiri punya pengalaman di bidang teknologi dan manufaktur. Ini bisa jadi peluang untuk terus bekerja sama dalam banyak aspek. (BKPM, 2021)

Daya tarik investasi China tidak terlepas dari kerangka inisiatif *Jalur Sutera dan Jalur Maritim Abad ke-21* atau yang lazim disebut *Belt and Road Initiative* (BRI) yang dicanangkan Presiden Xi Jinping pada tahun 2013. BRI menawarkan sebuah upaya untuk memperluas peluang bagi pembangunan dan kesejahteraan bersama melalui kerja sama konektivitas yang saling menguntungkan. Diharapkan dari terbangunnya fasilitas perhubungan juga membuka kerja sama lainnya, seperti perdagangan, investasi, dan hubungan antarmasyarakat. Hal itu juga sejalan dengan prioritas Presiden RI Joko Widodo yang ingin meningkatkan pembangunan infrastruktur sehingga investasi infrastruktur diharapkan bisa terdorong dengan inisiatif tersebut. (BKPM, 2021)

Ada empat koridor pembangunan ekonomi yang ditawarkan pemerintah Indonesia dalam kerangka tersebut, yakni, *pertama* pembangunan kawasan terintegrasi di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Bali. Secara perinci, koridor pertama tersebut adalah pembangunan infrastruktur di antaranya Kuala Namu *Aerocity* dan kawasan industri di Sumatera Utara.

Kedua, pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan kawasan industri KIPIT Tanah Kuning di Kalimantan Utara. *Ketiga*, pembangunan Bandar Udara Internasional Lembeh, kawasan wisata Likupang dan kawasan industri Bitung di Sulawesi Utara. Terakhir *keempat*, pembangunan *techno park* dan tol di Bali. Total potensi investasi dari empat koridor tersebut bernilai hingga 51,93 miliar dolar AS.

Derasnya investasi China diberbagai bidang di Indonesia telah melahirkan masalah sosial dan menimbulkan sentiment entis terhadap etnis Tionghoa. Kebijakan investasi China yang disertakan dengan penggunaan alat atau mesin asal China termasuk tenaga kerja yang mengharuskan dari China menjadi kekhawatiran tersendiri di masyarakat Indonesia. Kebijakan politik ekonomi Presiden China Xi Jinping berupa *turn-key project* mengharuskan negara penerima investasi China menggunakan tenaga kerja asal China dalam posisi top manager dan pekerja lapangan lainnya (Yusuf, 2016). Kenyataan tersebut memicu sentimen anti-Tionghoa di Indonesia, ditambah dengan budaya *Tanah Leluhur* orang-orang Tionghoa yang masih menganggap China Daratan adalah Tanah Nasionalitas mereka sedangkan Indonesia hanyalah tempat rantau mencari ekonomi dan penghidupan semata.(Suryadinata, 1985)

Sementara itu, jumlah orang Tionghoa di Indonesia kurang dari tiga persen dari total populasi. Namun, etnis Tionghoa tidaklah homogen secara struktural, karena etnis Tionghoa dibagi menjadi peranakan (orang Tionghoa yang lahir di Indonesia dan berbahasa Indonesia) dan totok (orang Tionghoa yang berbahasa China, umumnya lahir di China). (Suryadinata, 1986)

Ketika Indonesia memproklamkan kemerdekaannya tahun 1945, etnis Tionghoa peranakan membentuk berbagai macam organisasi untuk melindungi kepentingan etnis Tionghoa. Partai Tionghoa pertama yang ada di Indonesia adalah Partai Tionghoa Indonesia, tetapi pada tahun 1950 berganti nama menjadi Persatuan Tenaga Baru (*Union of Indonesian Forces*) dan menjadi partai multi ras. Tetapi partai ini gagal berkembang karena dikalangan orang Tionghoa konsep multiras belum populer. (Suryadinata, n.d.)

Namun, ketika pertama kali akan diselenggarakan pemilihan umum di Indonesia, berbagai partai etnis Tionghoa termasuk Partai Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI) bertekad

membentuk organisasi baru yang dikenal dengan nama Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia). Organisasi Baperki tidak dibentuk berdasarkan etnis, tetapi pada kenyataannya organisasi ini dikenal sebagai organisasi Tionghoa Indonesia. Baperki bukan hanya mendirikan sekolah-sekolah berbahasa Indonesia untuk anak-anak peranakan, tetapi juga berpartisipasi dalam pemilihan umum. (Suryadinata, 1981)

Lama kelamaan Baperki didominasi oleh kelompok sayap kiri yang dipimpin Siauw Giok Tjhan dan berhasil menggeser kepemimpinan yang dipimpin Thiam Hien. Baperki kemudian sangat dekat dengan PKI dan presiden Soekarno. Gagalnya G-30 S/PKI tahun 1965 menyebabkan PKI dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah baru termasuk Baperki. Kudeta yang gagal tersebut, menyebabkan kekerasan anti China di Indonesia semakin meningkat dan akhirnya kegiatan politik orang-orang Tionghoa dijalankan secara individu dan bukan secara organisatoris. (Suryadinata, 1986)

Bahkan, Orde Baru menandai berakhirnya berbagai organisasi politik dan sosial budaya berdasarkan etnis di Indonesia. Pendekatan politik berintegrasi diperkenalkan dan partisipasi politik lebih cenderung dilakukan secara perorangan bukan berdasarkan kelompok etnis. Orang Tionghoa yang tertarik pada politik dapat berpartisipasi melalui partai politik pribumi, yaitu partai pemerintah GOLKAR (kelompok fungsionaris), partai oposisi yaitu partai Demokrasi Pancasila (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Organisasi lain yang didominasi etnis Tionghoa yang digunakan sebagai kelompok penekan adalah Prasetya Mulya, organisasi Prasetya Mulya didirikan pada tahun 1980 yang berupa yayasan dan bertujuan membantu pemerintah melaksanakan program-program sosial. Kemudian, organisasi ini juga membentuk Institut manajemen yang bertujuan melatih para manajer Indonesia. (Suryadinata, 1985)

Setelah serangkaian kerusuhan, pada tanggal 21 Mei 1998 kembali masalah etnis Tionghoa di Indonesia mendapat sorotan Internasional terutama negara China. Tetapi kerusuhan tersebut menjadi titik awal dari proses perbaruan etnis Tionghoa menjadi lebih baik, seperti keterlibatan beberapa etnis Tionghoa dalam pemerintahan eksekutif di era reformasi ini, antara lain Kwik Kian Gie sebagai ketua Bappenas dan Laksamana Sukardi Sebagai Menteri Negara Privatisasi dan BUMN serta Sofyan Wanadi sebagai Ketua Dewan Penasehat Ekonomi Nasional yang memberikan rekomendasi ekonomi langsung kepada Presiden. (Suryadinata, n.d.)

Permasalahan dalam penelitian ini adalah secara ekonomi dan politik partisipasi etnis Tionghoa telah berbaur dengan masyarakat pribumi, akan tetapi secara tradisi etnis Tionghoa memegang teguh pada tanah leluhurnya yaitu China, sehingga permasalahan yang dapat penulis sampaikan adalah kebijakan anti-rasialisme pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa membawa berdampak pada keinginan etnis Tionghoa yang berada di Indonesia untuk lebih berpartisipasi bukan saja di bidang ekonomi tetapi juga di bidang politik termasuk keinginan etnis Tionghoa Indonesia berpartisipasi politik. (Hidayat, 1977). Ada baiknya penulis sampaikan beberapa orang etnis Tionghoa yang masuk dalam kancah politik nasional maupun daerah yang dapat dilihat pada tabel :

Tabel 1.1
Partisipasi Politik Etnis Tionghoa di Pemerintahan Pusat maupun Daerah

No	Nama	Kegiatan Politik
1.	Lieus Sungkharisma (Li Xuexiong) Ponijan Liaw Alexander Ferry Widjaya Julianus Juta	Mendirikan Parti (Partai Reformasi Tionghoa) pada tanggal 5 Juni 1998 di Jakarta
2.	Jusuf Hamka (A Bun)	Mendirikan Parpindo (Partai Pembauran Indonesia)
3.	Tan Swie Ling	Mendirikan Partai Warga Bangsa Indonesia
4.	Nurdin Purnomo (Wu Nengbin)	Memimpin PBI (Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia)

5.	Kwik Kian Gie	Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Indonesia (1999-2000)
6.	Budiono Tan	Anggota MPR Utusan Daerah Kalimantan Barat
7.	Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. (<i>Zhōng Wànxué</i>)	Gubernur DKI Jakarta (2014) Komisaris Utama Pertamina (2019)
8.	Isyak Meirobie (Lie That Tjin)	Anggota DPRD Kabupaten Belitung
9.	Bobby Jayanto (Bu Hui)	Anggota DPRD Tanjung Pinang

Sumber : **Thung Ju Lan**, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) : 2020.

Kemudian, penulis mencoba mengambil beberapa teori konsep yang mempunyai relevansi dengan *core subject* Ilmu Hubungan Internasional terutama Hukum Internasional dan Politik Internasional, sekalipun tidak menutup kemungkinan memiliki kolerasi dengan *core subject* lainnya

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul, sebagai berikut: **“MENINGKATNYA INVESTASI ASAL CHINA DAN PENGARUHNYA TERHADAP AKTIVITAS POLITIK ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA”**.

B. Identifikasi Masalah.

Di Indonesia berdasarkan pendapat Leo Suryadinata membahas masalah minoritas etnis Tionghoa yang merupakan masalah lama yang berakar dan merupakan warisan jaman Kolonial yang menyangkut dua aspek, yaitu :

1. Aspek Psikologis, sebagai akibat ditempatkannya mereka di bahwa golongan kulit putih tetapi diatas golongan pribumi.
2. Aspek ekonomi, yang menyebabkan mereka menguasai penghidupan ekonomi menengah sehingga lebih mudah bagi mereka untuk maju ke usaha besar pada waktu jaman penjajahan

Belanda kedua aspek ini menyebabkan timbulnya pandangan anti entis Tionghoa pada masyarakat pribumi. (Suryadinata, 1986)

Proses partisipasi politik etnis Tionghoa di Indonesia mengalami hambatan, karena sebelumnya masyarakat Indonesia merasa tidak mendapat keadilan di bidang ekonomi yang mayoritas dikuasai oleh etnis Tionghoa. Namun, setelah kerusuhan Mei 1998, dimana terjadi penganiayaan dan pemerkosaan terhadap etnis Tionghoa merupakan titik balik proses partisipasi politik etnis Tionghoa dalam bidang politik, setelah Indonesia mendapat sorotan dari masyarakat internasional terutama dari negara China. (Wibowo, 1999)

Proses partisipasi politik yang semakin memberikan harapan tersebut, masih berjalan belum sempurna, karena para pengusaha etnis Tionghoa yang melarikan modalnya ke luar negeri masih belum kembali ke Indonesia, hal itulah sebagai salah satu penyebab masih ragunya masyarakat Indonesia kepada etnis Tionghoa akan kepedulian krisis yang di alami Indonesia saat ini (Jahja, 1994). Kenyataan tersebut menimbulkan setemen etnis dengan masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok yang tengah menjadi perbincangan hangat dalam kontelasi nasional saat ini. Apalagi kedatangan pekerja Tiongkok ini diikuti peristiwa janggal seperti penyelundupan dan penanaman bibit sayuran berbakteri, serta pengibaran bendera China di sejumlah kawasan di Indonesia. Muncul kekhawatiran masyarakat akan adanya agenda terselubung di balik eksodus tenaga kerja asal China. Tak dapat dibantah, dan dikhawatirkan akan adanya rencana invasi China terhadap Indonesia semakin nyata.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, penulis mengidentifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan investasi China di Indonesia?.
2. Bagaimanakah partisipasi etnis Tionghoa dalam proses politik di Indonesia?.

3. Bagaimanakah besarnya investasi China dapat mendorong aktivitas politik etnis Tionghoa di Indonesia?.

1. Pembatasan Masalah.

Untuk lebih memfokuskan masalah, penulis membatasi permasalahan pada investasi China dan partisipasi politik etnis Tionghoa di Indonesia setelah mendapat inspirasi dari kebijakan pemerintah terhadap partisipasi politik etnis Tionghoa periode tahun 2014 - 2019.

2. Perumusan Masalah.

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah penulis merumuskan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana kebijakan *turn-key project* pada investasi China dapat menjadi inspirasi bagi proses partisipasi politik etnis Tionghoa di Indonesia?”**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian yang dapat penulis sampaikan, adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui kebijakan investasi China di Indonesia.
- b. Mengetahui partisipasi etnis Tionghoa dalam proses politik di Indonesia.
- c. Mengetahui besarnya investasi China dapat mendorong aktivitas politik etnis Tionghoa di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian.

Sedangkan kegunaan penelitian dalam penyusunan skripsi ini, sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai keterlibatan politik etnis Tionghoa di Indonesia sehubungan adanya proses perbaruan kewarganegaraan.

- b. Sebagai panduan dan acuan bagi para peneliti yang akan mengadakan dan meneruskan penelitian sejenis.
- c. Sebagai sumbangan ilmiah untuk memperkaya khazanah pemikiran bagi studi hubungan internasional khususnya tentang etnis Tionghoa di Indonesia.
- d. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Strata I (SI), pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.